

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
UNTUK MENCEGAH KONFLIK SOSIAL
PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Lukman Hakim¹, Eka Dewanti²
lukmanhakim@dsn.moestopo.ac.id

Abstract

The Community Early Awareness Forum either directly or indirectly has a mission to facilitate the information process that occurs between the government and the community. FKDM is also a form of government strategy in a form of community organization that carries out early community awareness, and conducts early detection or observation activities and searches for all indications that can create conditions of disturbance to people's lives in the surrounding environment, then these indications collected and accommodated in accordance with the data and information obtained in the field and later the related data and information will be submitted to the local government. The purpose of this study is to find out how the community participates in the Community Early Awareness Forum (FKDM) at the National Unity and Politics Agency to prevent social conflicts that occur in the administrative city of South Jakarta. The research method that will be used in this research is descriptive, namely research that seeks to provide an overview of various things that exist as research material by digging, exploring, finding facts and problems faced and then presented through interpretation and analyzed using a qualitative approach. . While the qualitative approach is oriented to a theoretical orientation, theory is limited to the notion that a systematic statement relates to a set of propositions derived from the data being tested. Theory also helps to relate the basis of its orientation to the data and can be utilized in data collection and analysis.

Keywords: Community Participation, Social Conflict, Social Organization

Abstrak

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki misi untuk memfasilitasi proses informasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat. FKDM juga merupakan sebuah bentuk strategi pemerintah dalam sebuah bentuk organisasi kemasyarakatan yang menjalankan kewaspadaan dini masyarakat, serta melakukan deteksi dini atau aktifitas pengamatan dan pencarian semua indikasi-indikasi yang dapat menciptakan kondisi gangguan terhadap kehidupan masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya, lalu indikasi-indikasi tersebut dikumpulkan dan ditampung sesuai dengan data serta informasi yang didapatkan di lapangan dan nantinya data serta informasi terkait akan diserahkan kepada pemerintahan daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencegah konflik sosial yang terjadi pada Kota administrasi Jakarta Selatan. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk memberikan gambaran mengenai berbagai hal yang ada menjadi bahan penelitian dengan cara menggali, mendalami, menemukan fakta-fakta dan permasalahan permasalahan yang dihadapi untuk kemudian dipaparkan melalui penafsiran dan dianalisa menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan pendekatan kualitatif berorientasi pada orientasi teoritis, teori dibatasi pada pengertian bahwa suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data yang diuji. Teori juga membantu menghubungkan dasar orientasinya dengan data dan dapat dimanfaatkan dalam pengumpulan dan analisis data.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Konflik Sosial, Organisasi Sosial

PENDAHULUAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan badan pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik. Melihat dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas memberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Selain itu, Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati atau Walikota. Yakni, menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga (desentralisasi) dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Walikota. Dalam menjalankan tugas pokoknya Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan penanganan konflik, pembinaan dan pelaksanaan tugas

dibidang kesatuan bangsa, politik dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan penanganan konflik, penyelenggaraan kesekretariatan kantor, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di dalam struktur Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat Sub Bidang Kewaspadaan yang memiliki fungsi sebagai pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program pencegahan dan penanganan konflik, pelaksanaan pengkoordinasian tugas dan program kegiatan fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik dengan instansi dan atau lembaga terkait, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program pencegahan dan penanganan konflik, pelaksanaan analisis potensi konflik, penanganan konflik dan rekonsiliasi serta rehabilitasi.

Kota Jakarta Selatan adalah Kota Administrasi yang paling kaya dibandingkan dengan wilayah lainnya, dengan banyaknya perumahan warga kelas menengah ke atas dan tempat pusat bisnis utama. Jumlah penduduk Kota Jakarta Selatan ditahun 2018 sebanyak 2.296.977 jiwa, termasuk diantaranya 2.198 jiwa merupakan warga negara asing (WNA).

Tabel I.1
Proyeksi Penduduk Provinsi Kota Administrasi Jakarta Selatan Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin

Kab	2018			
	Rasio Jenis Kelamin	Jenis Kelamin (Jumlah)	Jenis Kelamin (Perempuan)	Jenis Kelamin (Laki-laki)
Jakarta Selatan	100.04	2246137	1122833	1123304
Jagakarsa	100.90	401730	199969	201761
Pasar Minggu	100.65	309032	154016	155016
Cilandak	96.06	202633	103351	99282
Pesanggrahan	100.66	223306	111287	112019
Kebayoran Lama	98.74	308699	155328	153371
Kebayoran Baru	98.41	143971	72561	71410
Mampang Prapatan	105.03	147334	71859	75475
Pancoran	101.36	155550	77249	78301
Tebet	98.82	211594	106425	105169
Setiabudi	101.01	142288	70788	71500

(Sumber: <https://jakarta.bps.go.id/>) 2018

Dengan jumlah penduduk yang banyak dan perbedaan, seperti suku, agama, bahasa, pribadi, perilaku, pola pikir dan sebagainya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa suatu hari nanti akan menimbulkan konflik. Konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Konflik merupakan hal yang alami, yang setiap individu pasti pernah dihadapkan dalam suasana demikian. Dalam kondisi yang tampak damai pun, masih terdapat potensi konflik atau konflik yang sifatnya masih tersembunyi (*latent conflict*).

Agar tetap menjaga kondisi yang harmonis maka diperlukan upaya khusus untuk menangani konflik. Jika konflik masih berada pada tahap *latent*, maka salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan pencegahan konflik (*conflict prevention*). Pencegahan konflik merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam rangka penyelesaian konflik. Pencegahan konflik atau biasa dikenal dengan *conflict prevention* bertujuan untuk mencegah konflik agar tidak mencapai padang tingkat *open conflict*.

Artinya, pencegahan konflik merupakan langkah awal agar konflik tidak muncul sebagai tindakan yang destruktif. Untuk itu, konflik harus bisa dikelola agar tidak sampai pada tindak kekerasan. Dalam mencapai keberhasilan dalam pencegahan konflik sosial di lingkungan masyarakat diperlukan peranan antara pemerintah dengan masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan atau visi misi yang ingin di jalankan keputusan dari masyarakat yang akan menjadikan tujuan tersebut tercapai dan dari partisipasi masyarakat negara ini akan terasa damai karna adanya kerjasama dalam mencapai tujuan bersama.

Untuk itu Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan politik sub bidang kewaspadaan ditahun 2006 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat mengumpulkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta membantu pemerintah mendeteksi dini dan mencegah timbulnya konflik sosial, partisipasi masyarakat ini kemudian dibentuk ke dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Pelibatan Partisipasi Masyarakat di dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat diharapkan, mampu membantu pemerintah setempat dalam mendekteksi dini tau meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap suatu konflik sosial di lingkungan Kota Jakarta Selatan.

Berdasarkan tabel diatas terdapat penurunan dan juga kenaikan indeks kerawanan sosial di beberapa kelurahan di Kota Jakarta Selatan, kerawanan sosial jika tidak di perhatikan dan diawasi dengan baik maka sewaktu-waktu dapat menimbulkan berbagai konflik sosial. Maka dari itu, sangat diperlukan peran aktif masyarakat yang terbentuk di dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, sehingga potensi terjadinya konflik sosial dapat terus ditekan dan menciptakan lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan menjadi lebih aman dan nyaman.

Tetapi sejauh ini masih terdapat beberapa kendala yang di hadapi oleh masyarakat yang tergabung didalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, seperti hal nya kurang adanya kerjasama, koordinasi dan komunikasi antara anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan masyarakat sekitar, dengan pemerintah setempat dan juga pihak yang berwenang dalam pencegahan konflik sosial itu sendiri. Sehingga, mengakibatkan keterlambatan

informasi yang diterima atau bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang informasi yang seharusnya didapatkan oleh anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Para anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat juga masih sangat memerlukan pelatihan dan pengetahuan yang lebih banyak lagi tentang fungsi dan perannya khususnya dalam pencegahan konflik sosial. Dengan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mendalami bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Untuk Mencegah Konflik Sosial Pada Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Organisasi Publik

Organisasi publik dikembangkan dari teori organisasi, oleh karena itu untuk memahami organisasi publik dapat ditinjau dari sudut pandang teori organisasi. Organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemilikinya. (Fahmi, 2013:1). Sedangkan menurut Stephen P. Robbins (Fahmi, 2013:2), organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Pengertian organisasi publik berkenaan dengan proses pengorganisasian.

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dengan demikian hasil pengorganisasian

adalah struktur organisasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. (Handoko, 2011:167)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi publik adalah salah satu wadah yang menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dilandasi dengan pengaturan hukum yang mendukungnya. Sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga Negara dan pemerintah. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak organisasi, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan melakukan koordinasi yang baik.

Tujuan organisasi publik sendiri menurut Etzioni (Handoko, 2011:109), yaitu suatu keadaan yang diinginkan di mana organisasi bermaksud untuk merealisasikan dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektifitas mencoba untuk menimbulkannya. Tujuan organisasi meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misi lembaga. Pendirian organisasi publik bertujuan secara optimal bagi peningkatan:

- a. Kesejahteraan rakyat, karena pada hakekatnya pelayanan publik

- merupakan infrastruktur bagi setiap warga negara untuk mencapai suatu kesejahteraan;
- b. Budaya dan kualitas aparat pemerintah untuk menjadi abdi bagi negara dan masyarakatnya, bukan sebagai penguasa terhadap negara dan masyarakatnya;
 - c. Kualitas pelayanan umum atau publik di berbagai bidang pemerintahan umum dan pembangunan terutama pada unit-unit kerja pemerintah pusat dan daerah, sehingga masyarakat diharapkan akan mendapatkan perilaku pelayanan yang lebih cepat, tepat, murah, dan memuaskan. Selain itu, era reformasi menuntut pelayanan umum harus transparan dan tidak diskriminatif dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pertimbangan efisiensi. (Handoko, 2011:109)

Manajemen Publik

Manajemen publik atau dapat juga disebut manajemen pemerintah secara umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen saat ini menjadi suatu unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi pada sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta.

Ada setidaknya tujuh karakteristik manajemen sektor publik yang membedakannya dengan sektor swasta:

- 1) Sektor publik tidak mendasarkan keputusan pada pilihan individual dalam pasar, akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan dimana

- tuntutan masyarakat yang sifatnya kolektif (massa) akan disampaikan melalui perwakilannya yang dalam hal ini adalah partai politik atau DPR.
- 2) Penggerak sektor publik adalah karena adanya kebutuhan sumber daya, seperti air bersih, listrik, keamanan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya yang menjadi alasan utama sektor publik untuk menyediakannya.
 - 3) Dalam organisasi sektor publik, informasi harus diberikan kepada publik seluas mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, yang artinya sektor publik sifatnya terbuka kepada masyarakat dibandingkan dengan sektor swasta.
 - 4) Organisasi sektor publik berkepentingan untuk menciptakan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan utama hidupnya, misalnya kebutuhan terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi dan sarana-sarana umum lainnya.
 - 5) Sektor publik dihadapkan pada permasalahan keadilan distribusi kesejahteraan sosial, sedangkan sektor swasta tidak dibebani tanggung jawab untuk melakukan keadilan seperti itu.
 - 6) Dalam organisasi sektor publik, kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Dalam hal tertentu masyarakat adalah pelanggan, akan tetapi dalam keadaan tertentu juga masyarakat bukan menjadi pelanggan.
 - 7) Dalam sektor swasta persaingan (kompetisi) merupakan instrument pasar. (Mahmudi, 2010:38)

Sedangkan dalam sektor publik tindakan kolektif menjadi instrument pemerintahan. Sangat sulit bagi pemerintah untuk memenuhi keinginan dan kepuasan tiap-tiap orang dan yang

mungkin dilakukan adalah pemenuhan keinginan kolektif. Pada pendekatan *manajerialisme*, fungsi-fungsi *strategik* seperti perumusan strategi, perencanaan *strategik*, dan pembuatan program merupakan hal yang harus dilakukan oleh manajer publik. *Manajerialisme* sektor publik berorientasi pada pemenuhan tujuan, pencapaian visi dan misi organisasi yang sifat pemenuhannya jangka panjang (Mahmudi, 2010:37).

Untuk mewujudkan perubahan menuju sistem manajemen publik yang berorientasi pada kepentingan publik dan lebih fleksibel, Alison (Mahmudi, 2010:37) mengidentifikasi ada setidaknya tiga fungsi manajemen yang secara umum berlaku di sektor publik maupun swasta, yaitu:

- a. *Fungsi strategi*, meliputi: Penetapan tujuan dan prioritas organisasi; membuat rencana operasional untuk mencapai tujuan.
- b. *Fungsi manajemen komponen internal*, meliputi: Pengorganisasian dan penyusunan staf; pengarahan dan manajemen sumber daya manusia; pengendalian kinerja.
- c. *Fungsi manajemen konstituen eksternal*, meliputi: Hubungan dengan unit eksternal organisasi; Hubungan dengan organisasi lain; Hubungan dengan pers dan publik.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dalam sektor swasta yang diadopsi ke dalam manajemen sektor publik demi pemenuhan kebutuhan publik dilakukan oleh pemerintah yang menginginkan perubahan yang berorientasi pada kepentingan publik dan lebih fleksibel. Sebagai bentuk nyata dari manajemen publik, pada penelitian ini pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Pada Kota Administrasi Jakarta Selatan akan dilihat dari sisi kinerja organisasi tersebut. Selain itu, pengadopsian

aktivitas manajemen yang menekankan pada sasaran akhir demi mewujudkan tujuan dari dibentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk mencegah Konflik Sosial merupakan aspek penting dalam penelitian ini.

Good Governance

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Governance menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.

Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

Ciri-Ciri Good Governance

Dalam dokumen kebijakan united nation development programme (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu:

1. Mengikuti sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
2. Menjamin adanya supremasi hukum.
3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.
4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Yang artinya, proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Soekanto (1993: 104), para antropologi sosial biasanya mengartikan masyarakat sebagai wadah dari orang-orang yang buta huruf, mengadakan reproduksi sendiri, mempunyai adat istiadat, mempertahankan ketertiban dengan menerapkan sanksi-sanksi sebagai sarana pengendalian sosial, dan yang mempunyai wilayah tempat tinggal yang khusus. Istilah masyarakat terkadang dipergunakan dalam artian "gesellschaft" atau sebagai asosiasi manusia yang ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu yang terbatas sifatnya, sehingga direncanakan pembentukan organisasi-organisasi tertentu, dalam hal

ini maka masyarakat adalah kelompok manusia yang sengaja dibentuk secara rasional, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu pula.

Menurut Soekanto (1993: 105), masyarakat sebenarnya merupakan suatu bentuk kehidupan bersama manusia, yang mempunyai ciri-ciri pokok, sebagai berikut:

1. Manusia yang hidup bersama secara teoritis, maka jumlah manusia yang hidup bersama ada dua orang. Didalam ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi, tidak ada suatu ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada.
2. Bergaul selama jangka waktu yang cukup lama.
3. Adanya kesadaran, bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan.
4. Adanya nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi patokan bagi perilaku yang dianggap pantas.
5. Menghasilkan kebudayaan dan mengembangkan kebudayaan tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk memberikan gambaran mengenai berbagai hal yang ada menjadi bahan penelitian dengan cara menggali, mendalami, menemukan fakta-fakta dan permasalahan permasalahan yang dihadapi untuk kemudian dipaparkan melalui penafsiran dan dianalisa menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan pendekatan kualitatif berorientasi pada orientasi teoritis, teori dibatasi pada pengertian bahwa suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data yang diuji. Teori juga membantu menghubungkan dasar

orientasinya dengan data dan dapat dimanfaatkan dalam pengumpulan dan analisis data. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif sebab penulis ingin menggambarkan/mendeskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencegah konflik sosial pada Kota Administrasi Jakarta Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat didalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Aspek Kontribusi Masyarakat adalah salah satu bagian terpenting tentang bagaimana Partisipasi Masyarakat di dalam organisasi tersebut. Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat, digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena, di antara banyak hal, partisipasi terkait erat dengan gagasan HAM. Dalam pengertian ini, partisipasi adalah suatu tujuan dalam dirinya sendiri; artinya, partisipasi mengaktifkan ide HAM (Hak Asasi Manusia), hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi dan untuk memperkuat demokratis deliberative. Sebagai suatu proses dalam pengembangan masyarakat, partisipasi berkaitan dengan HAM dengan cara lainnya. Jika HAM lebih dari sekadar pernyataan dalam deklarasi yaitu jika partisipasi berakibat membangun secara aktif kultur HAM sehingga menjamin berjalannya proses-proses dalam pengembangan masyarakat secara partisipatif adalah suatu kontribusi signifikan bagi pembangunan kultur HAM, suatu kebudayaan yang partisipasi warga negaranya merupakan proses yang diharapkan dan normal dalam suatu upaya pembuatan keputusan.

Dalam hal ini, partisipasi adalah alat dan juga tujuan karena membentuk bagian dari dasar kultur yang membuka terbukanya jalan bagi tercapainya HAM. Dalam partisipasi harus mencakup kemampuan rakyat untuk memengaruhi kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Arti partisipasi sering disangkut pautkan dengan banyak kepentingan dan agenda yang berbeda yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat dan pembuatan keputusan secara politis. Dalam lain hal, Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga Negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah suatu forum yang berfungsi guna mencegah dan mendeteksi dini Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) diwilayah pantau masing-masing forum tersebut berada. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat itu sendiri dibentuk dari masyarakat sekitar yang kemudian di seleksi oleh pemerintah setempat, dalam hal ini Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki tugas untuk memproses seleksi administrasi untuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dimana tujuan dan fungsi dibentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ini karena keterbatasan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dibandingkan dengan daerah yang harus dipantaunya, jadi dengan mengumpulkan masyarakat didalam satu forum diharapkan dapat membantu pemerintah setempat dalam

melaksanakan tugasnya memonitoring wilayah sekitar.

Proses penyeleksian meliputi proses seleksi administrasi dimana persyaratan untuk menjadi anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat harus Warga Negara Indonesia dimana dalam hal ini, harus berdomisili di Kota Administrasi Jakarta Selatan, pengalaman berorganisasi minimal 3 tahun, berumur 25-60 tahun, sehat jasmani dan rohani, berpendidikan minimal Sekolah Menengah Akhir (SMA/SLTA), kemudian di lanjutkan dengan tes tertulis dan tes wawancara dalam hal ini tim penyeleksi melakukan sesi diskusi untuk mengukur sejauh mana wawasan dan pengetahuan calon anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ini.

Pemerintah memilih untuk mengumpulkan partisipasi masyarakat dibandingkan dengan orang yang memang sudah terlatih dan professional dalam hal ini dikarenakan, dengan mengumpulkan partisipasi masyarakat didalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat nantinya informasi yang didapatkan akan mudah, karena unsur unsur yang terdapat didalamnya adalah unsur dari masyarakat sekitar wilayah tersebut. Jadi dengan kata lain Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ini adalah dari partisipasi masyarakat dan untuk kebaikan bagi masyarakat juga.

Partisipasi masyarakat sendiri dapat dilihat dari segi kontribusi apa saja yang sudah diberikan oleh anggota Forum Kewaspadaan Dini selama ini di dalam organisasi tersebut. Kontribusi tersebut dapat berupa kontribusi tenaga dan pemikiran serta kontribusi sara dan juga kontribusi dana.

Pencegahan Konflik Sosial oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Aspek Pemberdayaan Masyarakat sangat erat kaitannya dengan bagaimana

organisasi tersebut menjalankan tugas dan kewajibannya. Pencegahan konflik merupakan strategi struktural dan operasional jangka menengah dan panjang yang dilakukan secara proaktif oleh pelbagai aktor untuk mengidentifikasi dan membuat kondisi yang memungkinkan bagi lingkungan aman yang lebih stabil dan terprediksi. Upaya pencegahan konflik bisa dilakukan dengan:

1. membangun mekanisme peringatan dini (early warning system) yang memungkinkan setiap institusi memonitor hubungan inter-state, inter-society, dan antara state dan society
2. membangun atau mengembangkan mekanisme institusional untuk mencegah intensitas eskalasi konflik
3. memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat yang rentan konflik.

Sistem pencegahan konflik fokus untuk mencegah konflik menjadi kekerasan. Terjadinya konflik menjadi kekerasan terkait erat dengan proses penyelesaian konflik pada awalnya dan hal ini terkait dengan kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, pencegahan konflik diarahkan untuk menciptakan kondisi yang mendorong penyelesaian konflik secara dini dan meningkatkan kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik sebelum berkembang menjadi kekerasan. Pada dasarnya kerangka kerja pencegahan konflik di Indonesia disusun untuk memperkuat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi persoalan sosial-politik-ekonomi agar tidak berkembang menjadi kekerasan.

Sistem pencegahan konflik atau kerangka kerja pencegahan konflik pada dasarnya adalah sebuah sistem manajemen untuk mengembangkan pengetahuan tentang konflik dan cara-

cara pencegahannya. Sumber daya untuk pencegahan konflik tidak lagi terpisahkan namun terpusat pada struktur koordinatif yang memobilisasi sumber daya-sumber daya tersebut untuk digunakan secara efektif. Pencegahan konflik bukan merupakan reaksi ad hoc atas persoalan-persoalan konflik. Pencegahan konflik merupakan strategi struktural dan operasional jangka menengah dan panjang yang dilakukan secara proaktif oleh pelbagai aktor untuk mengidentifikasi dan membuat kondisi yang memungkinkan bagi lingkungan aman yang lebih stabil dan terprediksi.

Salah satu tugas dan fungsi dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah mencegah dan mendeteksi dini kejadian yang akan menimbulkan konflik sosial, agar nanti sebisa mungkin konflik tersebut dapat di cegah dan tidak timbul. Akan tetapi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat mempunyai batasan hanya sebatas memantau dan menginformasikan info yang didapat kepada pemerintah setempat yang nantinya laporan tersebut akan di proses, di survei ulang dan kemudian diambil tindakan. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tidak bisa melakukan aksi yang lebih dari sekedar menginformasikan laporan yang didapatkan, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari unsur samping dimana unsur samping yang dimaksud adalah TNI/POLRI yang juga di tugaskan di tempat tersebut. Walaupun hanya sebatas memberikan informasi tetapi peranan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam pencegahan konflik sosial sangat penting dalam pencegahan konflik sosial, dengan adanya Frum Kewaspadaan Dini Masyarakat sendiri laporan yang diterima oleh pemerintah setempat lebih cepat, dan lebih beragam. Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat mempunyai peran yang sangat besar

mulai dari proses pemantauan dan pembuatan laporan, proses survei dan juga sampai pada tahapan proses penyelesaian konflik.

Struktur di dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Aspek Pengorganisasian Masyarakat adalah aspek tentang apa tujuan dan fungsi diadakannya atau di bentuknya suatu organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Dan selain itu struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan.

Struktur organisasi adalah suatu susunan atau hubungan antara komponen bagian-bagian dan posisi dalam sebuah organisasi, komponen-komponen yang ada dalam organisasi mempunyai ketergantungan. Sehingga jika terdapat suatu komponen baik maka akan berpengaruh kepada komponen yang lainnya dan tentunya akan berpengaruh juga kepada organisasi tersebut.

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Struktur organisasi dapat menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan dari pekerjaan antara yang satu dengan kegiatan yang lainnya dan juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsi dibatasi. Di dalam struktur organisasi yang baik harus dapat

menjelaskan hubungan antara wewenang siapa melapor atau bertanggung jawab kepada siapa, jadi terdapat suatu pertanggungjawaban apa yang akan di kerjakan. Itulah beberapa definisi struktur organisasi.

Adapun fungsi / kegunaan dari struktur dalam sebuah organisasi, berikut dibawah ini penjelasannya:

1. Kejelasan tanggung jawab.

Setiap anggota dari organisasi harus dapat bertanggung jawab dan juga apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap anggota suatu organisasi tentunya harus dapat bertanggung jawab kepada pimpinannya atau kepada atasannya yang telah memberikan kewenangan, karena pelaksanaan atau implementasi kewenangan tersebut yang perlu dipertanggungjawabkan. Itulah fungsi struktur organisasi tentang kejelasan tanggung jawab.

2. Kejelasan kedudukan.

Yang selanjutnya yaitu kejelasan mengenai kedudukan, disini artinya anggota atau seseorang yang ada didalam struktur organisasi sebenarnya dapat mempermudah dalam melakukan koordinasi dan hubungan, sebab adanya keterkaitan penyelesaian mengenai suatu fungsi yang telah di percayakan kepada seseorang atau anggota.

3. Kejelasan mengenai jalur hubungan.

Fungsi selanjutnya yaitu sebagai kejelasan jalur hubungan maksudnya dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab setiap pegawai didalam sebuah organisasi maka akan dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur sehingga dalam jalur penyelesaian suatu pekerjaan akan semakin lebih efektif dan dapat saling memberikan keuntungan.

4. Kejelasan uraian tugas.

Dan Fungsi lainnya yaitu kejelasan mengenai uraian tugas didalam struktur organisasi akan sangat membantu pihak

atasan atau pimpinan untuk dapat melakukan pengawasan maupun pengendalian, dan juga bagi bawahan akan dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan karena uraian yang jelas. Itulah salah satu fungsi sebagai kejelasan uraian tugas.

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik untuk Mencegah Konflik Sosial Pada Kota Administrasi Jakarta Selatan sehingga peneliti berusaha mencari data dan informasi sehingga dapat mendiskripsikannya. Hasil data-data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Hasil wawancara tersebut mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik untuk Mencegah Konflik Sosial Pada Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Pada hasil pembahasan, penulis mengulas tentang hasil wawancara yang telah penulis lakukan. Penulis telah melakukan wawancara langsung dengan Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan yaitu Bapak Dirhamul Nugraha, Bapak Indra Yusman selaku Kepala Subbidang Kewaspadaan di Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kota yaitu Bapak Abdul Hafiz, Bapak Sony selaku Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kecamatan, Wakil Ketua Forum Kewaspadaan Dini tingkat Kelurahan yaitu Ibu Novi, Ketua RT 4 dan Ketua RW 10 Bapak Iang dan Ibu Uci dan juga dari unsur samping yaitu Bapak Pendi selaku anggota Binmas Polsek Kebayoran Lama. Hasil Wawancara tersebut terkait 3 Dimensi dalam

Partisipasi Masyarakat yaitu Kontribusi Masyarakat,

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun masyarakat agar mereka memiliki inisiatif melakukan aktivitas sosial agar mereka bisa membenahi situasi dan kondisi mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Partisipasi masyarakat sering kali dianggap sebagai bagian yang tidak terlepas dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Dengan melihat partisipasi sebagai kesatuan dalam proses pemberdayaan masyarakat, akan dapat diketahui bahwa akar perkembangan pemikiran tentang partisipasif dalam pembangunan akan terkait dengan diskursus komunitas. Dimana salah satu diskursus komunitas adalah asumsi bahwa masyarakat bukanlah sekumpulan orang yang bodoh, yang hanya bisa maju kalau mereka mendapatkan perintah belaka. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

SIMPULAN

Penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Untuk Mencegah Konflik Sosial Pada Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat hanya dapat melakukan pencegahan

konflik sosial dengan cara deteksi dini kejadian dilingkungan sekitar yang sekiranya berpotensi menimbulkan konflik sosial, maka harus dilaporkan ke pemerintah setempat dan juga unsur samping (pihak yang berwenang dalam penanganan konflik sosial) untuk nantinya laporan tersebut dapat di survei dan di berikan tindaklanjut.

2. Kontribusi yang diberikan oleh para Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat selama ini sudah cukup baik, baik dari kontribusi tenaga dan pemikiran, kontribusi dana dan sarana yang selama ini ternyata sebagian besar masih menggunakan prasarana dan dana pribadi, walaupun setiap bulannya para anggota mendapatkan honor akan tetapi honor tersebut masih jauh dari harapan atau dapat dikatakan masih dibawah UMP.
3. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat merupakan model organisasi tertutup yang melakukan tugasnya secara diam diam, karena informasi yang dicari sifatnya adalah rahasia terutama dalam pendeteksian dini konflik sosial, jadi banyak masyarakat umum yang tidak mengetahui tentang keberadaan dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat itu sendiri.
4. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tidak hanya focus kepada pencegahan konflik sosial akan tetapi kepada bencana alam, dan laporan laporan umum lainnya seperti kerusakan jalan dan hal yang baru baru ini adalah tentang virus corona.
5. Terdapat kurangnya koordinasi dan kerjasama antara unsur samping, masyarakat sekitar dan Forum Kewaspadaan Dini masyarakat di beberapa lokasi yang menyebabkan terhambatnya informasi yang didapat serta proses dari pencegahan konflik sosial.

6. Selama ini motivasi dan rasa tanggung jawab dari para anggota Forum Kewsapadaan Dini Kota Administrasi Jakarta Selatan sudah cukup bagus,

karena banyak yang dari meraka benar benar berpartisipasi dengan tulus, walaupun sebageaian masih ada yang kurang.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, Sahya. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.

Basuki, Johanes. (2018). *Administrasi Publik*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Dede Rosyada Dkk. (2000). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

Denhardt, Janet V. and Denhardt, Robert B. (2007). *The New Public Service, Serving Not Steering, Expanded Edition, Armonk, New York, London*. England: M.E.Sharpe.

Fahim, Tharaba. (2016). *Sosiologi Agama, Konsep, Metode Riser, dan Konflik Sosial*. Malang: Madani.

Handoko, T. Hani. (2011). *Manajemen Personaliala Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.

Harahap, Sofyan. (2001). *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Penerbit Quantum.

Hava, Dayan & Chan Kwok, Bun. (2012). *Carismatic Leadership in Singapore*. Jerusalem: Hebrew University of Jerusalem.

Mahsun, Mohammad. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.

Mikkelsen, Britha. (2011). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Moheriono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nasution. (2009). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ndraha, Taliziduhu. (1990). *Pembangunan Masyarakat*

Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: Rineka Cipta.

Oakley, P. (1991). *Project with People: The Practice of Participation in Pural Development*. Geneva: Internatinal Labour Office Geneva.

Prastowo, A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Rahmat. (2013). *Filsafat Administrasi*. Bandung: Pustaka Setia

Situmorang. (2010). *Data Penelitian Menggunakan Program SPSS*. Medan: USU Press.

Soekanto, Soerjono. (1993). *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Solekhan, Moch. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Pers

Sondang, P. Siagian. (2010). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sondang, P. Siagian. (2011). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sondang, P. Siagian. (2014). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RFD*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RFD*. Bandung: Alfabeta.

Sumarto Hetifa Sj. (2003). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.

Sumaryadi, I Nyoman. (2010). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan*

Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta:
Penerbit Citra Utama

Syafri, Wirman. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik.* Jatinangor: Erlangga.

Theresia, Aprilia dkk. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat.* Bandung: Alfabeta.

Media:

<https://jakarta.bps.go.id/>

<https://danutaaldina.wordpress.com/2017/03/28/profil-kota-administrasi-jakarta-selatan-danuta-aldina/>

<https://ppid.jakarta.go.id/detail-file/>

Dokumen:

UU RI No.7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Panduan FKDM DKI Jakarta Tahun 2016.

Peraturan Gubernur No. 138 Tahun 2019 Tentang Kewaspadaan Dini Daerah.

Dokumen Pribadi Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan